SEJARAH DAN TANTANGAN INDONESIA KONTEMPORER

Shohibul Anshor Siregar

BERBAGAI FAHAM DALAM SEJARAH INDONESIA

SEJARAH KONSTITUSI KITA

**UUD NRI TAHUN 1945
HASIL AMANDEMEN
(4 KALI)**

What
Next?

**UUD 1945
DEKRIT 5 JULI 1959
SD TAHUN 1999**

**UUDS 1950
17 AGUSTUS 1950
SD 5 JULI 1959**

**KONSTITUSI RIS 1945
27 DESEMBER 1945
SD 17 AGUSTUS 1945**

**UUD 1945
18 AGUSTUS 1945 SD
27 DESEMBER 1949**

Masa transisi
Revolusi fisik
Yang belum
tuntas

Hanya 3 dari 16
Negara bagian
yang patuh kepada
Pemerintah pusat
(Negara Republik
Indonesia, Indonesia
Timur dan Sumatera
Timur)

Konstituante telah
bersidang 2,5 tahun.
Bung Karno menilai
perlu melakukan dekrit.
Dampaknya ialah
bahwa dirinya
menjadi penguasa
yang jauh dari
aroma demokrasi

Tuntutan Reformasi:
(1) Amandemen UUD
(2) Hapus Dwi-fungsi
ABRI
(3) Penegakan Hukum,
HAM, dan
pemberantasan KKN
(4) Otonomi Daerah
(5) Kebebasan Pers
(6) Meninjau ulang
kehidupan demokrasi

PRISMATIC SOCIETY (RIGGS)

BERHARAP ELIT NASIONAL TIDAK GAGAL MENGENDALIKAN PERUBAHAN

ANOMALI, STANDAR MORAL GOYAH,
PERUBAHAN BISA MENGHASILKAN REGRESS
YANG LEBIH BESAR KETIMBANG PROGRESS

OPINI PUBLIK TENTANG PELAKSANAAN PANCASILA

Semakin baik atau semakin burukkah kondisi masyarakat Indonesia dalam hal:

● Semakin baik   ● Semakin buruk
● Tetap   ● Tidak tahu

(dalam persen)

Sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belumkah pelaksanaan kebijakan pemerintahan terkait hal-hal berikut ini:

● Sudah   ● Belum   ● Tidak tahu
 (dalam persen)

Sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belumkah sikap dan perilaku elite-elite politik selama ini dalam menyelesaikan persoalan bangsa?

Percaya atau tidakkah Anda jika dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling baik bagi bangsa Indonesia?

(dalam persen, dibulatkan)

Metode Jajak Pendapat
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 27-29 Mei 2015. Sebanyak 581 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdistribusi di 12 kota di Indonesia. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian diperkirakan $\pm 4,2$ persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

Kuat atau lemahkah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di dalam lembaga ini? (dalam persen)

Hal-hal yang paling berpotensi merusak/mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara saat ini (dalam persen)

JAJAK PENDAPAT
TAHUN 2015

KONGRES PANCASILA 1 S.D. 8: GERAKAN KEMBALI KE DASAR

Disarikan dari berbagai sumber: SAS, 'nBASIS

MENEGUHKAN,
MEREAKTUALI-
SASIKAN, DAN
MEREVITALISASI
KAN NILAI-NIAI
PANCASILA
MENUJU
TERWUJUDNYA
INDONESIA
YANG
MODERN,
DEMOKRATIS
ADIL DAN
SEJAHTERA

**KONGRES
PANCASILA 2
UDAYANA
(2010)**

HARAPAN,
PELUANG DAN
TANTANGAN
PEMBUDA-
YAAN NILAI-
NILAI
PANCASILA

**KONGRES
PANCASILA 4
UGM (2012)**

STRATEGI
PEMBUDAYAAN
NILAI-NILAI
PANCASILA
DALAM
MENGUATKAN
SEMANGAT
KEINDONE-
SIAAN

**KONGRES
PANCASILA 6
(UNPATTI
(2014)**

REAKTUALISASI
TRI-SAKTI
UNTUK
MEWUJUDKAN
KESEJAH-
TERAAN
BANGSA
INDONESIA
BERDASAR
NILAI BUDAYA
PANCASILA

**KONGRES
PANCASILA 8
UGM
(2016)**

**KONGRES
PANCASILA 1
UGM (2009)**

KONSISTENSI
NILAI-NILAI
PANCASILA
DALAM UUD
1945 DAN
IMPLEMEN-
TASINYA

**KONGRES
PANCASILA 3
UNAIR
(2011)**

PENGUATAN,
SINKRONISASI,
HARMONISASI
DAN INTEGRASI
PELEMBAGAAN
DAN
PEMBUDAYAAN
PANCASILA
DALAM RANGKA
KEDAULATAN
BANGSA

**KONGRES
PANCASILA 5
UGM
(2013)**

PENGUATAN,
SINKRONISASI,
HARMONISASI
DAN INTEGRASI
PELEMBAGAAN
DAN
PEMBUDAYAAN
PANCASILA
DALAM RANGKA
MEMPERKO-
KOH
KEDAULATAN
BANGSA

**KONGRES
PANCASILA 7
UNMUL
(2015)**

REAKTUALIASI
TRI-SAKTI
DALAM
MEWUJUDKAN
BANGSA
INDONESIA YANG
BERDAULAT, ADIL
DAN MAKMUR
DENGAN
BERDASAR PADA
NILAI-NILAI
PANCASILA

tv one
LIVE

INDONESIA
LAWYERS
CLUB

"BENARKAH PKI BANGKIT LAGI?"

@ILC_tvOne

PRESIDEN FILIPINA TIRAT SERANGAN BOM DI BAGHDAD IRAK

22:47

see
5.7

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA PERINGKAT 4

Ketimpangan orang kaya dan miskin di Tanah Air masih tinggi. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan. Bahkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse menempatkan Indonesia di urutan keempat dengan disparitas kekayaan tertinggi.

NEGARA DENGAN KESENJANGAN TERTINGGI

Persentase kekayaan nasional yang dimiliki oleh 1 persen warga.

INDEKS KETIMPANGAN MASIH JAUH DARI TARGET

Jurang antara si kaya dan miskin di Indonesia masih tinggi. Dari target 0,36. Gini Ratio Indeks masih di angka 0,397 pada Maret 2016.

PERBANKAN NASIONAL DIKUASAI PEMILIK REKENING DI ATAS 2 MILIAR

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2017

Berita Resmi Statistik No. 66/07/Th. XX, 17 Juli 2017

Pada bulan Maret 2017

27,77

JUTA JIWA

ADALAH PENDUDUK MISKIN

Faktor Terkait Kemiskinan

INFLASI Sep 2016-Mar 2017
sebesar **2,24%**.
INFLASI Mar 2016-Mar 2017
sebesar **3,61%**.

Upah Nominal Harian Buruh
Tani Maret 2017 **naik 2,57%**.
Upah Riil Buruh Tani per hari
Maret 2017 **naik 0,16%**.

Upah Nominal Buruh
Bangunan Maret 2017
naik 1,51%.
Upah Riil Buruh Bangunan
per hari **turun 0,72%**.

Penurunan harga eceran
beras, daging ayam ras,
daging sapi, gula pasir, tepung
terigu, dan telur ayam ras.

Terjadi hambatan dalam
distribusi beras sejahtera
(rastra).

%

Persentase
Kemiskinan

10,64 PERSEN

Peningkatan
Jumlah
Penduduk Miskin

6,90

RIBU

dibandingkan
September 2016

Persentase
Penduduk
Miskin

perkotaan dan
perdesaan
TURUN

dibandingkan
September 2016.

BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

INDONESIA MENEMPATI URUTAN KE 41 DARI 138 NEGARA
DALAM GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

PROBLEM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

**INTI
KEKUA-
SAAN**

POWER TEND TO CORRUPT

- PARA PEMBANTU PRESIDEN & LEMBAGA TINGGI NEGARA
- LEMBAGA PENEGAK HUKUM KONVENSIONAL
- DUNIA USAHA DALAM/LUAR NEGERI INCLUDE BUMN/BUMD
- CABANG-CABANG BIROKRASI DAN PEMERINTAH DAERAH

LEGAL-FRAMEWORK DAN KODE ETIK SERTA TRADISI YANG BERKEMBANG AKIBAT PENENTUAN PROTAP KESUPERBODIAN YANG SALAH KAPRAH DITOPANG OLEH ATMOSFER POLITIK YANG TIDAK SEHAT

MITOS YANG DIABADIKAN:

- (-) DAERAH LEBIH KORUP DARIPADA PUSAT
- (-) LEGISLATIF LEBIH KORUP DARIPADA EKSEKUTIF
- (-) BIROKRASI PEMERINTAHAN LEBIH KORUP DARIPADA DUNIA USAHA
- (-) OPINI UMUM LEBIH PENTING DARIPADA PRESTASI KERJA
- (-) LEMBAGA PENEGAK HUKUM KONVENSIONAL DIPANDANG SEBAGAI BOROKNASIONAL

REVISI UU KPK BUKAN PADA BAGIAN REMEH-TEMEH

PERBAIKI SISTEM REKRUTMEN UNTUK MENDAPATKAN ORANG YANG MEMILIKI INTEGRITAS

BATASI USIA KPK

BATASI MASA KERJA PIMPINAN KPK 2,5 TAHUN

TINGKATKAN BESARAN KASUS YANG DAPAT DITANGANI KPK MENJADI RP 5 MILYAR UP

TENTUKAN MODEL SINERGITAS DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM KONVENSIONAL

**KEKUASAAN KPK
TIDAK BERSUMBER
DARI PRESIDEN
MELAINKAN
BERSUMBER DARI UU**